

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan rujukan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Andre Saputra (2023). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang). Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang dialami hampir oleh setiap Bangsa dan Negara di Dunia. Fenomena tersebut sering dirasakan oleh negara yang terkebelakang dan Negara berkembang, termasuk didalamnya negara Indonesia yang masih dalam kategori berkembang. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Pogram Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang) dikategorikan belum efektif, dikarenakan terdapat indikator yang belum terpenuhi hal tersebut dapat dilihat dari pembahasan dan setiap indikator dan aspeknya yaitu sebagai berikut. Pertama, dari sub variabel ketepatan sasaran program dengan indikator pencapaian sasaran, dalam hal ini pencapaian sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang yang ke 2 yaitu kepuasan terhadap program, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum puas dengan Program Keluarga Harapan (PKH), ini dikarenakan uang yang mereka terima PKH masih tergolong sedikit.

2. Muhammad Windi (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus desa Panangkalaan dan desa Padang Baser Hilir)". Indonesia sebagai Negara berkembang masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi, memiliki masalah kemiskinan yang masih menjadi sorotan utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera di pecahkan. Kemiskinan dan pengangguran merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemiskinan

merupakan salah satu faktor penyebab penghambat dan ketertinggalan dalam pembangunan suatu bangsa. Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam Pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai Kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga miskin, menguatnya arus imigrasi ke kota dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan rakyat secara terbatas. Tujuannya Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Untuk mengetahui Faktor mempengaruhi fakta Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam sub variabel keberhasilan program pada indikator kemampuan operasional sudah efektif, karena kemampuan operasional terhadap PKH sangat baik karena bisa dimanfaatkan untuk akses pendidikan., dan kesejahteraan sosial, penggunaannya pun sudah efektif. Dalam subvariabel keberhasilan sasaran pada indikator pencapaian tujuan belum efektif. karena penerima sasaran PKH belum tepat, hal ini dapat dilihat masih ada keluarga yang tidak mampu belum mendapatkan bantuan dikarenakan hasil wawancara yang mengatakan belum efektif dan dapat dilihat dari hasil yang menyatakan bahwa di Desa Panangkalaan dan desa Padang Basar Hilir tingkat output mengenai dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan

dari suatu kegiatan belum sesuai dan tidak memiliki (efektivitas, kualitas, dan efesiensi).

Adapun Sebagai bahan pertimbangan rujukan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa teori di antaranya :

B. Tinjaun Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Secara umum, pengertian efektivitas ini meruapakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau juga pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, serta juga waktu, sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Hery (2018:3), "Efektivitas mencerminkan pencapaian sasaran yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar yang membantu organisasi mencapai sasarannya".

Hani Handoko (Ismail Nawawi Uha,2015:93), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar sumbangan output terhadap tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Sinambela (2016:278), "Efektivitas adalah keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan".

Sudiro (2018:200), "Efektivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuannya dalam arti kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai".

Pasalong (2017:4), "Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan".

Handyaningrat dalam buku Eko Indra Heri (2020:184), menjelaskan bahwa efektivitas dapat dimaknai sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Devas dalam buku Chairil Anwar Pohan (2021:191) menyatakan bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah yang harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. Apabila dikaitkan dengan penerimaan pendapatan maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar berhasil mencapai target penerimaan pendapatan yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Robbins dalam buku Chairil Anwar Pohan (2021:187) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok, dan struktur dalam organisasi.

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo dalam buku Ratna Eka Sari (2020:20) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Dengan sasaran yang hendak dicapai itulah maka tujuan sebelumnya yang telah ditentukan akan mencapai

suatu keberhasilan sesuai apa yang menjadi keinginan. Efektivitas terjadi pada suatu aspek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas diartikan sesuatu yang dapat mencapai tujuan maksimal seperti yang diharapkan. Jika kita ingin melakukan suatu hal, maka kita harus melakukannya secara efektif supaya hasil yang dilakukan tidak mengecewakan.

b. Pendekatan Efektivitas

Pada teori Budiani dalam (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

1. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sarana yang hendak dicapai. Pendekatan sarana dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sarana yang realistis

untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

2. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan nya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena Lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan dengan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian efektivitas dalam menilai efektivitas program, Fathor Rasyid (2022)

menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi (Daniel Setiawan, 2022:22-23), sebagai berikut :

1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*), pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dan menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi di mana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis Data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
5. Pendekatan yang responsive (*the responsive approach*). Pendekatan responsive menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk satu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi ini

adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

c. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu organisasi tidaklah mudah, artinya dapat dipelajari dari sudut yang berbeda tergantung pada orang yang mengevaluasi dan menafsirkannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, kondisi itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Steers dalam buku Daniel setiawan et al (2022:22) ada 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, kriteria tersebut yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan mendapatkan nilai lebih,
5. Pencarian sumber daya

Menurut Duncan dalam Chairil Anwar Pohan (2021:188)

mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, agar pencapaian tujuan akhir makin terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri atas beberapa faktor, yaitu kurun waktu, dasar hukum, dan sasaran yang merupakan target konkret.
2. Integrasi. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi,

pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar organisasi. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi terdiri atas beberapa faktor: i) peningkatan kemampuan; ii) sarana dan prasarana.

Menurut James L. Gibson dalam Ilham (2022:8-9) bahwa

terdapat 7 (tujuh) kriteria untuk mengukur efektivitas yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang akan dicapai
2. Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Adanya perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat, serta
6. Adanya sarana dan prasarana dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Adapun Sebagai bahan pertimbangan rujukan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa teori di antaranya :

1. Teori Champbell J.P (Mutiarin dan Zaenudin, 2014;96-97), mengatakan:
 - a. Keberhasilan Program
 - b. Keberhasilan Sasaran
 - c. Kepuasan terhadap program
2. Teori Muasaroh (Bakulu, 2021:22) Efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:
 - a. Aspek tugas atau fungsi
 - b. Aspek rencana atau prpgram

c. Aspek ketentuan atau peraturan

d. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Untuk mengukur bagaimana efektifitas program penelitian ini menggunakan teori menurut teori Budiani dalam (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran ini tidak sesuai dengan waktu telah ditentukan, maka tidak efektif.

Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Richard M. Strees dalam buku Monica Feronica (2021:139) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas seperti:

1. **Karakteristik Organisasi.** Karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja, karena karakteristik organisasi ini menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Karakteristik dari organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur organisasi adalah cara menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola-pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.
2. **Karakteristik Lingkungan.** Karakteristik lingkungan ini secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi seperti peralatan, perlengkapan, hubungan diantara pegawai dan kondisi kerja. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan artinya memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi.
3. **Karakteristik Pekerja.** Pada kenyataannya para anggota merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku mereka lah yang dalam jangka tertentu akan memperlancar merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan.
4. **Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen.** Praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang dalam mengkondisikan semua hal ada didalam organisasi. Kebijakan dan praktek manajemen ini harus memperhatikan juga unsur manusia sebagai individu yang memiliki perbedaan bukan hanya mementingkan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya dan menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana, adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan inovasi organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Kemiskinan adalah permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang maka harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis agar seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada

dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan juga sampai pada tingkat ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial dan ekonomi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, baik kebutuhan fisik, sosial, maupun psikologis. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, akses terhadap layanan publik, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan dalam akses, kesempatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Menurut World Bank, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi standar hidup minimum. Namun, definisi ini berkembang seiring waktu karena kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan uang atau pendapatan, melainkan juga berkaitan dengan kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.

Dalam pandangan yang lebih luas, kemiskinan juga merupakan bentuk ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Seorang tokoh

ekonomi dan pembangunan, Amartya Sen, memaknai kemiskinan sebagai ketiadaan kemampuan (capability deprivation), yaitu kondisi di mana seseorang kehilangan kebebasan untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga. Artinya, kemiskinan tidak hanya tentang tidak memiliki uang, tetapi juga tentang tidak memiliki kesempatan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara layak, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain itu, kemiskinan juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Orang miskin sering kali mengalami keterpinggiran, diskriminasi, dan keterbatasan dalam bersuara di ruang publik. Mereka lebih rentan terhadap berbagai risiko sosial seperti pengangguran, penyakit, keterlantaran, kekerasan, serta bencana alam. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya persoalan individu, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan, ketidakadilan sosial, serta kebijakan ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok lemah.

Secara multidimensional, kemiskinan mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kemiskinan ekonomi, yaitu rendahnya pendapatan dan daya beli.
2. Kemiskinan pendidikan, yaitu keterbatasan akses dan rendahnya kualitas pendidikan.
3. Kemiskinan kesehatan, yaitu keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai.

4. Kemiskinan sosial, yaitu keterasingan dari lingkungan sosial dan lemahnya perlindungan sosial.
5. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sistem dan kebijakan yang tidak adil.

Dengan demikian, kemiskinan secara luas dapat dipahami sebagai kondisi ketidakberdayaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak, mengembangkan potensi diri, serta berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan materi, tetapi juga masalah ketimpangan, keterbatasan kesempatan, dan hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia.

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial Pemerintah Indonesia. Secara luas, PKH bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan.

Adapun tujuan PKH secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengurangi Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial

PKH bertujuan untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehingga beban ekonomi rumah tangga dapat dikurangi. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan

terjadi penurunan angka kemiskinan serta berkurangnya kesenjangan sosial antara masyarakat miskin dan nonmiskin.

2. Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Anak dari Keluarga Miskin

Salah satu tujuan utama PKH adalah memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dan tidak putus pendidikan. Bantuan PKH mendorong keluarga untuk menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan menengah, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak

PKH bertujuan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita. Keluarga penerima diwajibkan memanfaatkan fasilitas kesehatan secara rutin, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan pemantauan gizi, guna menurunkan risiko kematian ibu dan anak serta mencegah stunting.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga

PKH tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman sosial serta meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan.

5. Mendorong Perubahan Perilaku Positif Masyarakat

Melalui sistem bantuan bersyarat, PKH mendorong perubahan perilaku keluarga dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Keluarga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga didorong untuk lebih peduli terhadap masa depan anak, kesehatan keluarga, serta pola hidup sehat dan produktif.

6. Memutus Rantai Kemiskinan Antar Generasi

Tujuan jangka panjang PKH adalah memutus mata rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan pendidikan yang lebih baik serta kesehatan yang lebih terjamin, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik dibandingkan orang tuanya.

7. Meningkatkan Akses terhadap Sistem Perlindungan Sosial

PKH bertujuan memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok miskin dan rentan, sehingga mereka tidak terjebak dalam kondisi kemiskinan yang semakin parah akibat krisis ekonomi, bencana, atau permasalahan sosial lainnya.

8. Mendorong Kemandirian Ekonomi Keluarga

Dalam jangka panjang, PKH diarahkan tidak hanya sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai langkah awal menuju kemandirian keluarga melalui pendampingan sosial, edukasi pengelolaan keuangan, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya.

Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta upaya memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan dikatakan sebagai program unggulan nomor satu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan ini dijalankan sebagai pelaksana dari Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di Indonesia hal itu dibuktikan dalam dasar negaranya yaitu Pancasila, yang mengamatkan dalam sila ke limanya yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan sila tersebut negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

3. Maksud dan Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Mega Nugraha (2024:5-5), Salah satu tujuan dasar PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Dengan memberikan insentif bagi keluarga untuk memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan, program ini mendorong perubahan perilaku yang positif, seperti mengutamakan pendidikan anak dan menjaga kesehatan keluarga. Ketika keluarga menerima bantuan dengan syarat yang jelas, mereka didorong untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas hidup mereka. Selain itu, PKH juga bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi keluarga penerima manfaat.

Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, diharapkan keluarga akan mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Kemandirian ini sangat penting, karena membantu keluarga untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin muncul di masa depan.

C. Kerangka Pemikiran

Program Keluarga Harapan (PKH) Adalah Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kualitas hidup mereka. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan syarat keluarga tersebut harus memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia.

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Di Indonesia hal itu dibuktikan dalam dasar negaranya yaitu Pancasila, yang mengamatkan dalam sila ke limanya yaitu *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Berdasarkan sila tersebut negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Penelitian ini dijelaskan melalui teori efektivitas menurut teori Budiani dalam (Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3) adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

